

Mengungkap Persepsi Masyarakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Pengelolaan PAD dan APBD di Kalimantan Tengah

Okta Malinda, Muhammad Aji Lampang, Muhammad Abshar Noer Ramadhan, Pratama, Mar' Erfan Hadi Pratama, Theresia Octaviani, Glenn Andrenossa

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya
Email: okta.malinda@feb.upr.ac.id; ajilam3440@gmail.com; absarramadhan@gmail.com; pratama.bth.03@gmail.com; marelpahadiparatama@gmail.com; theresia.octaviani@feb.upr.ac.id; glennandrenossa@feb.upr.ac.id

Diterima:
29 September 2024

Diterima Setelah Revisi:
4 Oktober 2024

Dipublikasikan:
24 Oktober 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap tingkat kepercayaan pengelolaan PAD dan APBD di Provinsi Kalimantan Tengah. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah dengan usia 20 tahun ke atas. Pengumpulan data dilakukan dengan metode purposive sampling dengan menggunakan instrumen kuesioner yang sesuai dengan kriteria sampel. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dengan menggunakan IBM SPSS S. Berdasarkan hasil penelitian terkait variabel persepsi dan variabel kepercayaan, rata-rata jawaban responden menunjukkan hasil yang netral. Netralitas ini mungkin disebabkan oleh rasa segan atau kekhawatiran masyarakat dalam mengekspresikan pandangan mereka secara terbuka mengenai pengelolaan PAD dan APBD, yang dapat mencerminkan kehati-hatian dalam berpendapat mengenai isu-isu yang berhubungan dengan pemerintah daerah. Selain itu, diketahui bahwa persepsi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan PAD dan APBD di Kalimantan Tengah dengan tingkat signifikansinya sebesar 79,6%. Hal ini berarti 79,6% dari tingkat kepercayaan masyarakat dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh persepsi masyarakat dan 20,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak ada dalam model penelitian ini.

Kata Kunci: Persepsi masyarakat, *good government*, akuntabilitas, transparansi

Abstract

This study aims to determine public perceptions of the level of trust in the management of PAD and APBD in Central Kalimantan Province. The sample in this study were people of Central Kalimantan Province aged 20 years and over. Data collection was carried out by purposive sampling method using a questionnaire instrument in accordance with the sample criteria. The data processing technique used is descriptive statistical analysis using IBM SPSS S. Based on the results of research related to perception variables and trust variables, the average respondent's answer shows neutral results. This neutrality may be due to the public's reluctance or concern in expressing their views openly regarding the management of PAD and APBD, which may reflect caution in having an opinion on issues related to local government. In addition, it is known that public perception has a significant influence on the level of trust in the management of PAD and APBD in Central Kalimantan with a significance level of 79.6%. This means that 79.6% of the level of public trust can be explained or influenced by public perceptions and the remaining 20.4% is influenced by other variables that are not in this research model.

Keywords: Public perception, *good government*, accountability, transparency

1 PENDAHULUAN

Kemampuan suatu pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah dapat menentukan tingkat kemajuan suatu daerah (Verawaty et al., 2020). Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan dua aspek penting dalam menjaga kemajuan dan keberlanjutan suatu wilayah. Di Kalimantan Tengah, manajemen PAD dan APBD menjadi fokus utama pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperbaiki infrastruktur dan pelayanan publik. Menurut Patiroy (2019), salah satu indikator kunci keberhasilan dalam pelayanan dan kesejahteraan masyarakat adalah kontribusi PAD dalam APBD. Jika kontribusi PAD semakin besar, maka akan semakin mandiri juga daerah otonom tersebut (Christianingrum & Aida, 2021). Meskipun begitu, masih terdapat permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan PAD dan APBD yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ada beberapa tantangan dalam mengelola PAD dan APBD seperti ketidakjelasan alokasi dana, penggunaan anggaran yang tidak efisien, dan tingkat akuntabilitas serta transparansi yang rendah. Sehingga hal tersebut dapat menjadi suatu faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pengelolaan PAD dan APBD dalam penggunaan dan pelaporan dana publik (Edtiyarsih & Izzabillah, 2023; Hariani & Alang, 2019).

Kurangnya transparansi dan maraknya kasus korupsi di Indonesia, khususnya yang terjadi di Kalimantan Tengah seperti kasus bupati Katingan yang terjerat kasus korupsi penyelewengan dana APBD sebesar 31 miliar, dan kasus-kasus lainnya yang menjerat kepala desa, pegawai pemerintah, sampai dengan bupati dalam pengelolaan PAD dan APBD dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap cara dana publik dikelola dan digunakan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga dapat menciptakan tata kelola yang buruk dan sulit untuk mewujudkan suatu *good government*. Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu menjalankan kegiatannya dengan lebih transparan dan juga akuntabel atau bertanggung jawab atas segala hal yang dilakukannya (Hariani & Alang, 2019). Dengan ini, maka persepsi masyarakat akan bergeser ke sisi yang lebih baik dan menciptakan *good government* di dalam pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah.

Maraknya kasus-kasus tersebut, terdapat signifikansi yang penting dalam konteks pengelolaan PAD & APBD di Provinsi Kalimantan Tengah (Patiroy, 2019). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkap persepsi masyarakat terhadap tingkat kepercayaan dalam pengelolaan PAD dan APBD pada Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan memahami persepsi masyarakat, Pemerintah daerah dapat mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memerlukan perbaikan dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan PAD dan APBD, sehingga dapat mewujudkan *good government*, yaitu pemerintahan yang baik dan beretika, yang mencerminkan tata kelola yang efektif dan bertanggung jawab di dalam Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah (Yudhasena & Putri, 2019). Dalam hal ini, maka perlu diterapkannya konsep dari teori legitimasi yang dimana menurut Shafirah Pratama et al. (2022), *legitimasi theory* adalah teori yang menyatakan bahwa pemerintah berupaya mempertahankan status sosial mereka dengan memastikan bahwa kegiatan mereka searah dengan nilai dan norma yang dapat diterima dalam masyarakat. Karena masyarakat adalah pihak pemangku kepentingan atau *stakeholder* dalam pemerintahan dan bersama-sama mempunyai peran yang penting dalam memajukan suatu daerah (Suryani & Robiansyah, 2022). Hal ini sejalan dengan *Stakeholder Theory* yaitu kerangka dasar untuk memahami dan mengelola kepentingan berbagai pemangku kepentingan (Masyarakat dan Pemerintah), yang penerapan nantinya dapat diperluas ke bidang lain seperti tanggung jawab sosial, etika, kesetaraan, ekonomi, dan keberlanjutan.

2 KAJIAN PUSTAKA

2.1. *Stakeholder Theory*

Menurut Mahajan et al. (2023), *Stakeholder Theory* adalah kerangka dasar untuk memahami dan mengelola kepentingan berbagai pemangku kepentingan, yang implikasinya kemudian dapat diperluas ke bidang lain seperti tanggung jawab sosial perusahaan, etika, dan keberlanjutan. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*) pertama kali disampaikan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984. Mendrofa et al. (2022) menjelaskan bahwa *stakeholder* adalah individu, kelompok masyarakat, dan organisasi tanpa memperhitungkan laki-laki maupun perempuan, yang diperhitungkan hanyalah individu atau kelompok yang memiliki sebuah kepentingan atau keterlibatan dalam suatu kegiatan. Dalam konteks pemerintahan, *stakeholder* adalah masyarakat umum yang memiliki kepentingan terkait pengelolaan infrastruktur oleh pemerintah dan merasakan dampak dari hal tersebut. Pemerintah wajib memikirkan kepentingan masyarakat dalam pengelolaan PAD dan APBD agar dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat serta menciptakan *good government* di dalam pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah.

2.2. *Legitimasi Theory*

Teori legitimasi yang pertama kali diusulkan oleh Downing dan Pfeffer tahun 1975 ini menekankan pentingnya keselarasan aktivitas perusahaan dengan memperhatikan norma dan regulasi yang berlaku dalam lingkungan sekitar (Puspitaningrum Herni Y & Indriani, 2021). Dalam ruang lingkup pemerintahan, legitimasi berhubungan dengan dukungan dan kepercayaan publik terhadap otoritas dan keputusan pemerintah. Maulida et al. (2022), menjelaskan bahwa teori legitimasi menyoroti adanya "kontrak sosial" antara organisasi dan lingkungannya, yang mencerminkan harapan masyarakat terhadap tata cara organisasi dalam menjalankan kegiatan mereka. Pada dasarnya, teori ini menekankan bahwa masyarakat merupakan faktor penting dalam pengembangan jangka panjang. Teori ini menyoroti pentingnya kebijakan dan tindakan pemerintah yang harus berdasarkan, norma, aturan, dan nilai yang ada pada masyarakat. Pemerintah harus menjalankan kegiatannya seperti pengelolaan PAD dan APBD dengan memperhatikan norma serta nilai yang ada di Masyarakat.

2.3. *Persepsi Masyarakat*

Menurut Virianita et al. (2019), persepsi terjadi karena suatu akibat dari proses mengelompokkan dan menafsirkan informasi yang diterima indera, sehingga hal tersebut membuat informasi dapat dimengerti. Informasi yang dimaksud dalam penelitian tersebut adalah pengelolaan PAD dan APBD yang dilakukan pemerintah di Kalimantan Tengah. Pada dasarnya persepsi sangat berhubungan dengan ekspresi dalam menanggapi segala stimulus yang berasal dari luar individu yang selanjutnya akan disimpulkan arti tertentu dari stimulus yang diterima (Siahaan & Adrian, 2021). Jadi persepsi masyarakat disini dapat disimpulkan sebagai sebuah sudut pandang atau ekspresi masyarakat terhadap sebuah stimulus yang terjadi.

2.4. *Good Government*

Yudhasena & Putri (2019), menyatakan bahwa *good government* dapat diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai pemerintahan yang baik dan beretika, Ini mencerminkan tata kelola yang efektif dan bertanggung jawab dalam suatu pemerintahan atau organisasi, yang ditenagai oleh standar etika profesional yang tinggi. Ini berarti bahwa sebuah pemerintahan atau organisasi yang dijalankan dengan baik dan beretika menunjukkan kemampuan untuk mengelola sumber daya dengan efisien, mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka, serta menjalankan kegiatan sesuai dengan nilai-nilai dan standar etika yang tinggi dalam praktik kerja mereka. Azizah & Najicha (2022), berpendapat bahwa *good government* memiliki prinsip tersendiri seperti transparansi, responsivitas, akuntabilitas, keadilan, efektifitas dan efisiensi, serta partisipasi. Penerapan konsep

good government dalam pengelolaan APBD dan PAD Kalimantan Tengah yang harus menekankan pentingnya tata kelola yang efektif, bertanggung jawab, dan beretika dalam administrasi pemerintahan. Dan pada intinya, *good government* adalah kerangka kerja untuk administrasi pemerintahan yang efisien, dimana tiga pilar utama ini bekerja sama dan saling mendukung dalam pengelolaan yang baik.

2.5. Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan Masyarakat adalah dasar dari interaksi yang saling percaya. Ini adalah keyakinan dalam suatu kelompok yang menuntut perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai bersama dan kepentingan kolektif. Kepercayaan masyarakat terhadap keterbukaan pemerintah dalam Pengelolaan dana PAD dan APBD menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukur persepsi masyarakat terhadap pemerintah daerah. Sikap pemerintah dalam menyajikan informasi PAD dan APBD merupakan pondasi untuk membangun kepercayaan masyarakat. Menurut Saputra et al. (2023), kepercayaan bukanlah hasil instan, tetapi merupakan hasil dari kontribusi setiap anggota komunitas, termasuk pemerintah dan masyarakat. Pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat terlihat dalam keberhasilan berbagai kebijakan publik yang membutuhkan partisipasi aktif dan ketaatan masyarakat (Arwati & Latif, 2019).

2.6. Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) merupakan suatu prinsip pertanggungjawaban publik tentang proses penyusunan anggaran dimulai dari perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, dan pelaksanaannya yang wajib dilaporkan dengan sebenar-benarnya dan dipertanggungjawabkan baik secara vertikal maupun horizontal. Akuntabilitas merupakan suatu tanggung jawab untuk menjelaskan terkait bagaimana kewenangan yang diperoleh (Hariani & Alang, 2019). Dalam sebuah organisasi pemerintahan, akuntabilitas mengacu kepada penyampaian informasi kepada publik mengenai kegiatan, program, dan kinerja pemerintahan baik secara finansial maupun non-finansial. Sofyani & Tahar (2021) berpendapat bahwa akuntabilitas akan dapat menjadi tolak ukur pemerintah untuk memberikan hasil yang positif kepada masyarakat melalui praktik transparansi. Akuntabilitas adalah salah satu elemen yang penting untuk mewujudkan *good government* yang saat ini sedang dilakukan oleh negara Indonesia. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD dan APBD dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

2.7. Transparansi

Menurut Nislandi & Munari (2023), transparansi merupakan suatu hak yang mencakup sebuah kesempatan kepada masyarakat untuk memahami keseluruhan proses dan juga pelaksanaan anggaran hingga pertanggungjawaban bagi pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Putra & Rasmini (2019) berpendapat bahwa transparansi menunjukkan semua warga masyarakat memiliki hak yang setara untuk memahami prosesnya sebuah anggaran yang terkait dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Penyajian informasi keuangan yang dibuat pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk pelaporan keuangan yang jelas, relevan, serta mudah untuk dipahami merupakan bentuk transparansi (Pahlevi et al., 2022). Transparansi dalam mengelola PAD dan APBD adalah prinsip yang sangat penting dalam tata kelola keuangan daerah. Tanpa transparansi, akan sulit untuk mempertanggungjawabkan tindakan pejabat pemerintah daerah yang terpilih atas tindakan mereka.

2.8. Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Febrianti & Maulana (2013) tentang pengaruh, didapatkan hasil bahwa persepsi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *trust* atau kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, diikuti oleh penelitian Hidayat & Nurlaila (2022) dengan hasil penelitiannya yaitu persepsi atau pandangan masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan dan

bernilai positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H: Persepsi masyarakat berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

3 METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif dengan *purposive sampling* adalah metode yang digunakan pada penelitian ini. Dengan menggunakan metode kuantitatif, kita mengukur persepsi masyarakat terkait dengan pengelolaan PAD dan APBD yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan nilai pada jawaban dari setiap pertanyaan tertutup yang ada di dalam kuesioner yang telah disebar. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun untuk sampel yang akan diambil adalah masyarakat dengan usia 20 tahun keatas yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin (Sugiyono, 2015) dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan tingkat *error* sebesar 5% yaitu sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Sampel} = \frac{\text{Populasi}}{1 + (\text{Populasi} \times \text{Tingkat Error}^2)}$$

$$\text{Ukuran Sampel} = \frac{1.940.500}{1 + (1.940.500 \times 5\%^2)}$$

$$\text{Ukuran Sampel} = 399,917564 = 400 \text{ Orang (dibulatkan)}$$

Selanjutnya, alat analisis yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah IBM SPSS Statistics untuk menguji data yang dihasilkan menggunakan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas guna memastikan bahwa informasi yang dihasilkan valid dan reliabel. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari tahu bagaimana persepsi masyarakat terhadap tingkat kepercayaan atas pengelolaan PAD dan APBD di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mengetahui hal tersebut, kami mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertutup dengan menggunakan skala likert kepada para responden dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, serta *good government*.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Validitas

Tabel 1. Uji validitas

Indikator/Item	Sig.	Kriteria	Keterangan
X.1	<0,001	Sig. < 0,05	Valid
X.2	<0,001		Valid
X.3	<0,001		Valid
X.4	<0,001		Valid
Y.1	<0,001		Valid
Y.2	<0,001		Valid
Y.3	<0,001		Valid

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) dari variabel persepsi terhadap variabel kepercayaan adalah sebesar <0,001. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai Sig. (2-tailed) lebih kecil daripada tingkat signifikansinya sebesar 5% atau 0,05. Jadi, dapat diambil

kesimpulan bahwa data yang digunakan dalam mengukur persepsi masyarakat terhadap tingkat kepercayaan pengelolaan PAD dan APBD di Kalimantan Tengah merupakan data yang valid sehingga dapat digunakan dalam melakukan penelitian.

4.2. Uji Reliabilitas

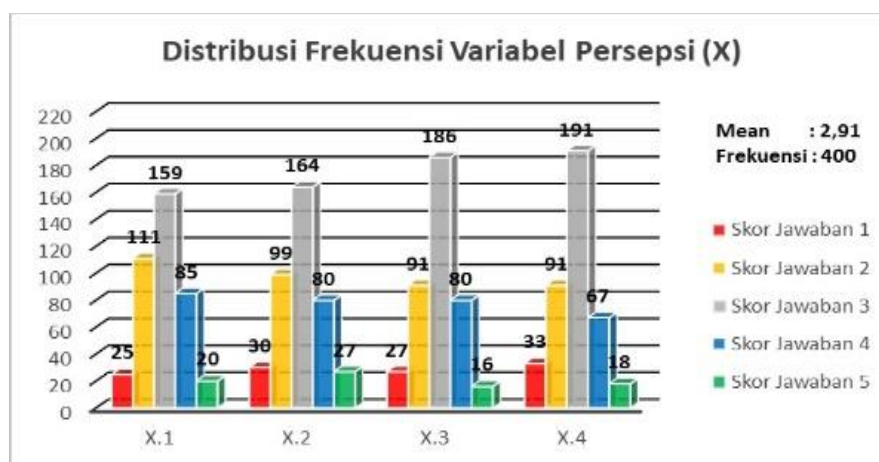
Tabel 1. Uji reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Persepsi (X)	0,862	Cronbach's Alpha > 0,6	Reliabel
Kepercayaan (Y)	0,765		Reliabel

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha dari Variabel Persepsi (X) adalah 0,862 dan Variabel Kepercayaan (Y) adalah 0,765. Nilai tersebut lebih besar dari standar 0,6 Sehingga dapat diambil kesimpulan instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat menghasilkan output atau data yang jika digunakan akan tetap memberikan hasil yang konsisten bila dilakukan secara berulang-ulang terhadap subjek yang sama terkait pengukuran persepsi masyarakat terhadap tingkat kepercayaan pengelolaan PAD dan APBD di Kalimantan Tengah, dengan kata lain data tersebut reliabel atau dapat diandalkan.

4.3. Analisis Deskriptif

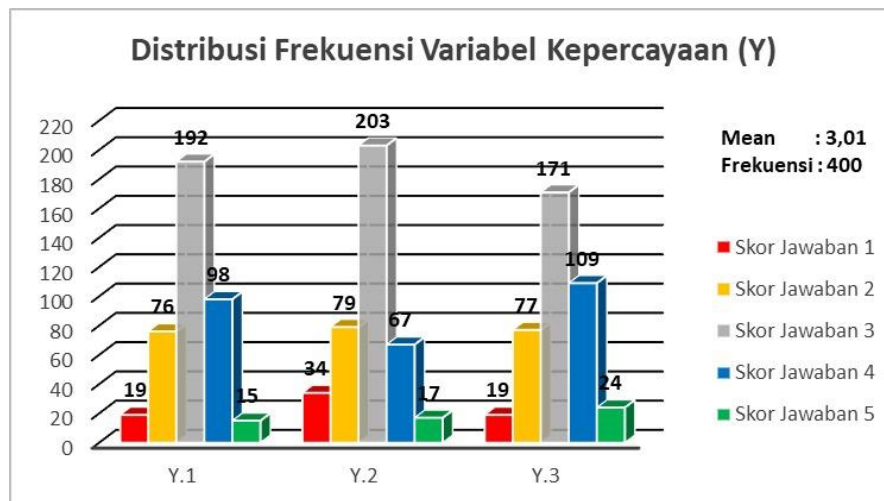
4.3.1. Deskriptif Variabel Persepsi (X)



Gambar 1. hasil jawaban kuesioner variabel persepsi (x)

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa Variabel Persepsi (X) memiliki rata-rata jawaban responden sebesar 2,91 dengan kategori netral, maka dengan ini menunjukkan bahwa jawaban responden terkait persepsi terhadap pengelolaan PAD dan APBD di Kalimantan Tengah bersifat netral. Jawaban netral tersebut, dapat disebabkan oleh berbagai macam alasan, seperti kurangnya pemahaman responden terhadap pertanyaan yang diajukan atau karena ingin “bermain aman” atau bisa dikatakan tidak mau kena resiko yang di karena rasa segan dalam menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan pemerintahan. Selain itu, jawaban netral tersebut juga bisa disebabkan oleh variasi jawaban dari masing-masing responden sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing.

4.3.2. Deskriptif Variabel Kepercayaan (Y)



Gambar 2. hasil jawaban kuisioner variabel kepercayaan (Y)

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa Variabel Kepercayaan (Y) memiliki rata-rata jawaban responden sebesar 3,01 dengan kategori netral, maka dengan ini menunjukkan bahwa jawaban responden terkait kepercayaan terhadap pengelolaan PAD dan APBD di Kalimantan Tengah bersifat netral. Jawaban netral tersebut, dapat disebabkan oleh berbagai macam alasan, seperti kurangnya pemahaman responden terhadap pertanyaan yang diajukan atau karena ingin “bermain aman” atau bisa dikatakan tidak mau ambil resiko karena rasa segan dalam menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan pemerintahan. Selain itu, jawaban netral tersebut juga bisa disebabkan oleh variasi jawaban dari masing-masing responden sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing.

4.4. Uji Regresi

Tabel 2 Hasil uji regresi
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.729	.192		9.006	.000
	TOTAL_X	.627	.016	.892	39.432	.000

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Berdasarkan output di atas, dapat diketahui bahwa nilai Sig. dari model regresi ini adalah sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai Sig. lebih kecil daripada tingkat signifikansinya sebesar 5% atau 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa persepsi masyarakat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kepercayaan masyarakat terkait pengelolaan PAD dan APBD oleh pemerintah di Kalimantan Tengah.

Dari output tersebut, juga didapat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta.X$$

$$Y = 1,729 + 0,627.X$$

Dari persamaan regresi tersebut, dapat diuraikan bahwa:

- Nilai *Constant* sebesar 1,729, yang berarti bahwa nilai konsisten Variabel Kepercayaan (Y) adalah sebesar 1,729 jika Variabel Persepsi (X) bernilai 0. Artinya, kepercayaan Masyarakat dapat digambarkan secara konsisten bernilai 1,729 jika tidak ada pengaruh sama sekali dari Persepsi masyarakat terhadap PAD dan APBD di Kalimantan Tengah.
- Nilai Koefisien regresi Variabel Persepsi (X) sebesar 0,627 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai Variabel Persepsi, maka nilai Variabel Kepercayaan akan bertambah sebesar 0,627. Hal ini berarti setiap bertambah 1 nilai dalam persepsi Masyarakat, maka kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana PAD dan APBD akan bertambah sebesar 0,627.
- Nilai Koefisien regresi Variabel Persepsi (X) tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh Variabel Persepsi (X) terhadap Variabel Kepercayaan (Y) adalah positif. Berarti, semakin tinggi persepsi masyarakat terhadap pengelolaan dana PAD dan APBD oleh pemerintah daerah, maka kepercayaan masyarakat juga akan semakin tinggi.

Jadi, setiap persepsi masyarakat berubah ke arah yang lebih positif, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat. Sebaliknya, setiap persepsi masyarakat berubah ke arah yang lebih negatif, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan menurun.

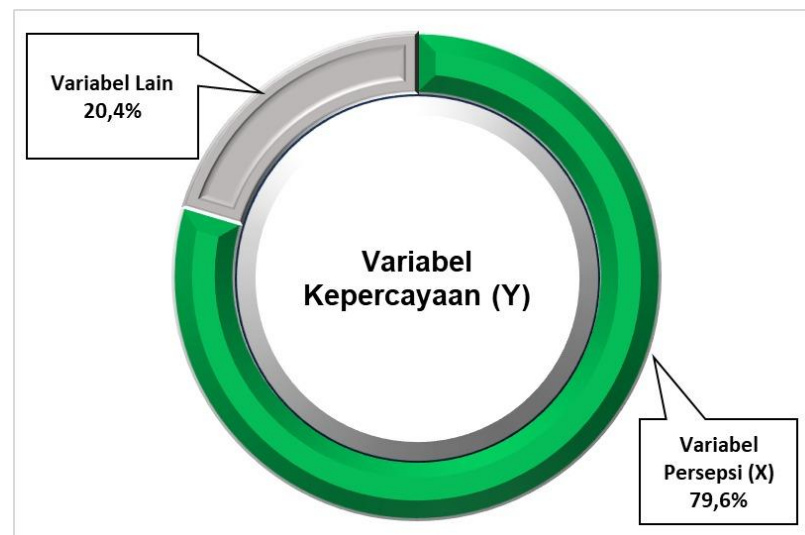
4.5. Uji R²

Tabel 3. Hasil uji determinasi (R²)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.892 ^a	.796	.796	1.026

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X

Berdasarkan output di atas, dapat diketahui bahwa nilai Koefisien Determinasi (R Square) dari model regresi ini adalah sebesar 0,796 atau 79,6%, yang mengindikasikan bahwa 79,6% dari Variabel Kepercayaan (Y) dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh Variabel Persepsi (X). Hal ini mengindikasikan bahwa Variabel Persepsi (X) berpengaruh secara signifikan terhadap Variabel Kepercayaan (Y), karena sebagian besar dari Variabel Kepercayaan (Y) dipengaruhi oleh Variabel Persepsi (X). Lalu, 20,4% dari Variabel Kepercayaan (Y) sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak ada di dalam model regresi ini.

Gambar 3. Persentase output uji determinasi (R^2)

5 SIMPULAN

Kepercayaan masyarakat terkait pengelolaan PAD dan APBD di Kalimantan Tengah merupakan hal yang krusial karena Pengelolaan PAD dan APBD merupakan dua aspek penting dalam menjaga kemajuan dan keberlanjutan suatu wilayah. Cara pemerintah dalam menyajikan informasi mengenai PAD dan APBD adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dengan memahami persepsi masyarakat, pemerintah daerah dapat mengenali area-area yang membutuhkan perbaikan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan PAD dan APBD, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian terkait variabel persepsi dan variabel kepercayaan, kedua variabel menunjukkan hasil yang netral. Netralitas ini mungkin disebabkan oleh rasa segan atau kekhawatiran masyarakat dalam mengekspresikan pandangan mereka secara terbuka mengenai pengelolaan PAD dan APBD, yang dapat mencerminkan kehati-hatian dalam berpendapat mengenai isu-isu yang berhubungan dengan pemerintah daerah. Selain itu, dengan memanfaatkan *Legitimasi Theory* dapat dipahami bahwa jawaban netral tersebut juga bisa disebabkan oleh variasi jawaban dari masing-masing responden sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing yang dapat menyebabkan legitimasi dari masyarakat di setiap wilayah berbeda-beda. Selanjutnya, diketahui bahwa persepsi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan mereka terhadap pengelolaan PAD dan APBD di Kalimantan Tengah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Febrianti & Maulana (2013) dan Hidayat & Nurlaila (2022). Dengan menggunakan *Stakeholder Theory*, dapat dilihat bahwa ketika pemerintah mampu mengelola ekspektasi dan kepentingan masyarakat dengan baik, persepsi yang positif akan terbentuk, yang selanjutnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, persepsi negatif yang tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan kepercayaan, sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan keterbukaan dan komunikasi dengan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan masyarakat yang lebih kuat dan memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efektif untuk meningkatkan kemajuan dan keberlanjutan wilayah.

Pengelolaan PAD dan APBD adalah elemen penting dalam memastikan kemajuan suatu wilayah, namun masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi dalam pengelolaannya untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Untuk meningkatkan

kepercayaan masyarakat terkait pengelolaan PAD dan APBD, pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD dan APBD untuk memberikan persepsi yang positif kepada masyarakat. Kemudian, pemerintah juga perlu lebih meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan PAD dan APBD agar tidak terjadi penyelewengan dana yang dapat memberikan perspektif yang buruk bagi masyarakat. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan lebih memperhatikan keragaman sosial, ekonomi, dan demografi masyarakat di Kalimantan Tengah dengan menggunakan metode stratified sampling agar sampel lebih representatif. Selain itu, pendekatan kombinasi metode (kualitatif dan kuantitatif) dapat membantu menggali faktor-faktor yang mempengaruhi sikap netral responden terkait isu pemerintahan. Penting juga untuk mengeksplorasi lebih dalam dimensi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD dan APBD serta dampaknya terhadap persepsi dan kepercayaan masyarakat. Peneliti dapat menggunakan pendekatan longitudinal untuk mengamati perubahan persepsi dari waktu ke waktu, serta melakukan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah untuk memahami dinamika yang mempengaruhi kepercayaan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwati, D., & Latif, D. V. (2019). TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN DALAM E GOVERNMENT KOTA BANDUNG. *Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan*, 5(2), 31–39. <http://doi.org/10.21070JBMP>.
- Azizah, A. R. N., & Najicha, F. U. (2022). Pengoptimalan E-Government Di Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Government. *Law, Development & Justice Review*, 5(2), 237–247.
- Christianingrum, R., & Aida, A. N. (2021). *ELASTISITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI INDONESIA PADA ERA OTONOMI DAERAH Elasticity of Regional Original Income in the Era of Regional Autonomy Ratna Christianingrum dan Ade Nurul Aida* (Vol. 6, Issue 1).
- Edtiyarsih, D. D., & Izzabillah, N. (2023). URGENSI ANGGARAN KAS DALAM MEWUJUDKAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) YANG EFISIEN PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 12(4), 368–382. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i4.74800>
- Febrianti, L., & Maulana, H. (2013). PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT PADA KINERJA KEPOLISIAN TERHADAP KEPERCAYAAN PADA KEPOLISIAN. *Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikologi*, 2(1), 63–71. <https://doi.org/10.21009/JPPP>
- Hariani, S., & Alang, S. (2019). ANALISIS PERBEDAAN PERSEPSI “STAKEHOLDERS” EKSTERNAL DAN INTERNAL TENTANG AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. In *Mabiska Jurnal* (Vol. 4, Issue 1).
- Hidayat, M. T., & Nurlaila. (2022). Analisis Pengaruh Persepsi dan Minat Masyarakat Terhadap Kepercayaan Pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 12(7), 18569–18586. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10985>
- Mahajan, R., Lim, W. M., Sareen, M., Kumar, S., & Panwar, R. (2023). Stakeholder theory. *Journal of Business Research*, 166. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114104>
- Maulida, M. N., Yousida, I., & Lestari, T. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Bkkbn Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 133–140.
- Mendrofa, V. M., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. A. (2022). PERAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DI PT. CABANG BANK SUMUT GUNUNGSITOLI DALAM MENJARING KERJASAMA DENGAN STAKEHOLDER SEBAGAI MITRA KERJA

- PEMERINTAH DI KOTA GUNUNGSITOLI THE ROLE OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AT PT. BANK SUMUT GUNUNGSITOLI BRANCH IN COLLABORATING WITH STAKEHOLDER AS PARTNERS GOVERNMENT IN GUNUNGSITOLI CITY. *Jurnal EMBA*, 10(4), 1517–1524.
- Nislandi, N. A., & Munari. (2023). *PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA, TRANSPARANSI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI SIDOARJO* (Vol. 12, Issue 2).
- Pahlevi, M. I., Susilowati, E., & Widoretno, A. A. (2022). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1480–1486. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Patiroi, A. (2019). ANALISIS KEMAMPUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM MEMBIAYAI BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTAENG. In *Economic* (Vol. 2, Issue 2).
- Puspitaningrum Herni Y, & Indriani, A. (2021). 32373-70681-1-SM. *DIPONEGORO JOURNAL OF MANAGEMENT*, 10(3), 1–15.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 132–158. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Saputra, A., Sutrasno, D., Setiawan, W., Penelitian, P., & Polri, P. (2023). *Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Polri Tahun 2022*.
- Shafirah Pratama, I., Risma, D., & 2*, D. (2022). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap institutional ownership pada perusahaan high-profile yang listing di bursa efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 18(3), 540–550. <https://doi.org/10.29264/jinv.v18i3.11701>
- Siahaan, C., & Adrian, D. (2021). *KOMUNIKASI DALAM PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH DIMASA PANDEMI (Studi Kasus Pada Kebijakan Vaksin Covid-19)* (Vol. 8, Issue 2).
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). PERAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA INDONESIA TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT DESA: KASUS DI KABUPATEN BANTUL. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 10–25. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481>
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan : Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*.
- Suryani, P., & Robiansyah, A. (2022). Open Government dan Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. *JURNAL RISET MAHASISWA AKUNTANSI*, 10(1), 60–70.
- Verawaty, Kemala Jaya, A., Puspanita, I., & Nurhidayah. (2020). *Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan* (Vol. 19, Issue 1).
- Virianita, R., Soedewo, T., Amanah, S., & Fatchiya, A. (2019). Farmers' Perception to Government Support in Implementing Sustainable Agriculture System. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 24(2), 168–177. <https://doi.org/10.18343/jipi.24.2.168>
- Yudhasena, I. G. I., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2019). Pengaruh Good Government Governance, Pengendalian Intern, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 434–464. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p17>